



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI DAN CIPTA KARYA

Jalan Sakti Lubis No. 7R Telp. (061) 7867465 – 7860466, Fax (061) 7867338
MEDAN

Medan, September 2026

Nomor : 500 /DBMBKCK-UM/2615/ XI /2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Penyampaian SK Daftar
Informasi Publik (DIP) TA. 2026

Yth Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
C.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

di -
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.12.18.1/001/III/2026 tanggal 28 Agustus 2026 tentang Penyampaian SK DIP Tahun 2026 dan Pengusulan Dokumen Informasi Publik Dikecualikan (DIK), yang menginstruksikan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku PPID Utama Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026, untuk dapat diterima, dicatat, dan menjadi bahan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI
DAN CIPTA KARYA,

CHANDRA BALIMUNTHE, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 19810816 20001 2 1005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI DAN CIPTA KARYA

Jalan Sakti Lubis No. 7R Telp. (061) 7867465 – 7860466, Fax (061) 7867338
MEDAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 061 / DBMBK-UM / 2609 IX / 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, DAN CIPTA KARYA
SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Pasal 35 (1) PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II, dan/atau PPID Pelaksana UPTD mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi Informasi Publik di unit kerja masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 (2) PPID Pelaksana setelah mengompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun usulan Daftar Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Informasi Publik Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Bina Marga,
Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 September 2026
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA DINAS BINA MARGA,
BINA KONSTRUKSI DAN CIPTA KARYA,

CHANDRA DALIMUNTHE, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 198108162000121005

Lampiran I : Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 061 / DBMBK-UM / 2609 / IX / 2026

Tanggal : 03 September 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNTUK DIAKSES
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, DAN CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara										
1.	Sejarah	Informasi Sejarah Ringkas Pembentukan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
2.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Kan Serta Merta	Wajib Diumumkan Kan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara									
3.	Daftar Nama Staf Beserta Jabatan	Daftar Nama Staf Beserta Jabatan	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
4.	Tugas Pokok Dan Fungsi	Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
5.	Alamat Kantor	Informasi Alamat Dan Nomor Telepon Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Kan Serta Merta	Wajib Diumumkan Kan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Program Dan Kegiatan											
1.	Rencana Strategis	Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu Tahun 2024 - 2029	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
2.	Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahun 2026 - 2027	Sekretariat dan Bidang Perencanaan	Sekretaris dan Kepala Bidang Perencanaan	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Serta Merta	Wajib Diumumkan Kan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rencana Program Dan Kegiatan	Rencana Program Kegiatan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu	Sekretariat dan Bidang Perencanaan	Sekretaris dan Kepala Bidang Perencanaan	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
4.	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu Tahun 2026	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku
5.	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Bina	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Serta Merta	Wajib Diumumkan Kan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu Tahun 2026									
6.	Ringkasan RKA Tahun 2026	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (Rka) Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu Tahun 2026	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku
7.	Ringkasan DPA Tahun 2026	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DBMBKCK Provsu	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Galeri Foto Dan Video	Galeri Foto Dan Video Kegiatan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
9.	Rilis Berita Dan Kegiatan	Rilis Berita Dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen	√				Selama Berlaku
C. Laporan Keuangan											
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2026	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Kan Serta Merta	Wajib Diumumkan Kan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Karya Provsu Tahun 2026									
2.	Daftar Aset Dan Inventaris Daerah Tahun 2026	Daftar Aset Dan Inventaris Daerah Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu Tahun 2026	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku
3.	Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2026	Laporan Arus Kas (Lak) Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dan Cipta Karya Provsu Tahun 2026	Sekretariat	Sekretaris	Medan, Maret 2026	Dokumen			√		Selama Berlaku

**USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI,
DAN CIPTA KARYA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026**

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUE	
				AKIBAT JIKA	MANFAAT
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Pegawai: - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general chek up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Biodata Elektronik PNS (Database) - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dokumen Perceraian meliputi Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi
2	Penjatuhan Hukuman disiplin:		Sampai memperoleh	Bertentangan dengan	

	- Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i bahwa dan j; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g;	persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	praduga tak bersalah	Melindungi i data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
	- Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari - Pejabat Berwenang Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin - dari Pejabat Berwenang Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin - dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKD - Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57			

3	Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa: - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	- Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum - Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja
4	Naskah Soal dan Naskah Hasil Tes CPNS/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat/ Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Keuangan dan Aset

6	- Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban - Informasi tentang Wajib Pajak Daerah - Laporan Pajak Pribadi - Data Pihak Ketiga dalam SP2D	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	- Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah - Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
---	--	---	--	---	--

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 03 September 2026

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
KEPALA DINAS BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI
DAN CIPTA KARYA,

CHANDRA DALIMUNTHE, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 19810816 20001 2 1005